

## **Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah**

Volume 3 No 2 (Agustus 2020): 10-26

ISSN: 2087-8761 E-ISSN: 2442-8248

Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/md/>

---

### **Partisipasi *Stakeholders* dalam Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Responsif Gender di MAN Insan Cendekia Gorontalo**

Najamuddin Petta Solong dan Ni'ma M. Alhabsyi  
(IAIN Sultan Amai Gorontalo)  
uddinpettasolong@gmail.com

---

**Abstract:** This paper analyzes stakeholder participation in gender responsive Madrasah Based Management (MBM) with various supporting and inhibiting factors in MAN Insan Cendekia Gorontalo. The participation of stakeholders in gender responsive MBM is manifested in planning, implementing and evaluating activities that involve teachers, parents, communities, scientists, to contribute, abilities, roles, and aspirations to the achievement of educational programs related to community service for students, native speakers, and Economic Subject Teacher Deliberation (MGMP) activities independently by not differentiating between men and women in MAN IC Gorontalo. As for the supporting factors, first, the state will bear the financing through DIPA. Second, the density of student activities with the boarding school system. The first inhibiting factor is the dependence of funds on the government so that it does not provide room for participation. Second, the management of education personnel in a centralized manner.

**Keywords :** stakeholder; Madrasah Based Management; gender responsive

**Abstrak:** Tulisan ini menganalisis partisipasi stakeholders dalam Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) responsif gender dengan berbagai faktor pendukung dan penghambatnya di MAN Insan Cendekia Gorontalo. Partisipasi stakeholders dalam MBM responsif gender terwujud dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang melibatkan guru, orangtua, masyarakat, ilmuwan, untuk memberikan kontribusi, kemampuan, peran, dan aspirasi kepada pencapaian program pendidikan terkait pengabdian masyarakat bagi peserta didik, native speaker, dan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ekonomi secara mandiri dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan di MAN IC Gorontalo. Adapun faktor pendukungnya pertama, pembiayaan ditanggung negara melalui DIPA. Kedua, padatnya kegiatan peserta didik dengan sistem boarding school. Faktor penghambatnya pertama, ketergantungan dana kepada pemerintah sehingga kurang memberi ruang partisipasi. Kedua, manajemen tenaga pendidikan secara sentralistik.

**Kata Kunci:** *Stakholder*; Manajemen Berbasis Madrasah; Responsif Gender

## **Pendahuluan**

Umumnya aktivitas manajemen pada setiap lembaga atau organisasi berkaitan dengan usaha untuk mengembangkan potensi dan memimpin suatu tim atau sekelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas tentunya harus memiliki manajemen yang baik.

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen P dan K menunjukkan bahwa manajemen madrasah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan.<sup>1</sup> Manajemen madrasah secara langsung mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses keseluruhan. Tanpa manajemen yang menekankan pada partisipasi *stakeholders*, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien.<sup>2</sup>

*Stakeholders* atau pemangku kepentingan yakni pihak-pihak terkait yang mempunyai perhatian dan kepentingan terhadap suatu program atau kegiatan. *Stakeholders* individu, kelompok atau organisasi yang memiliki perhatian terhadap sumberdaya atau hasil (*output*) pendidikan atau dipengaruhi oleh hasil tersebut.<sup>3</sup>

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 40 ayat 2 butir b, bahwa pendidikan dan tenaga pendidikan berkewajiban "mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan", Pasal 51 ayat 1, bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Madrasah.<sup>4</sup> Proses penerapan Manajemen Berbasis

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001), h. 2.

<sup>2</sup>Armai Arif, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CRSD Press, 2005), h. 70.

<sup>3</sup>Deby Febiolla Putri, "Analisa Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Madiun", *Jurnal Fisip Universitas Airlangga Surabaya*, 2017.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 9, 28, dan 34.

Madrasah responsif gender menjadi faktor dominan di samping faktor pendukung lain, misalnya iklim yang sehat, dukungan orang tua peserta didik dan masyarakat terhadap madrasah, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa, dan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan atau program pendidikan.<sup>5</sup>

Atas dasar pemikiran tersebut, peserta didik perempuan dan laki-laki memperoleh akses, penguasaan, partisipasi dan manfaat yang adil dan setara dalam bidang pendidikan, melalui kebijakan dan program pendidikan responsif gender serta kehidupan keluarga dan masyarakat berwawasan gender.

Pengamatan penulis di lokasi penelitian menunjukkan bahwa partisipasi *stakeholders* dalam perencanaan program pendidikan yang dilakukan melalui rapat kerja tahunan telah mengundang tokoh masyarakat dan komite madrasah namun lebih banyak laki-laki yang memberikan kontribusi berupa ide atau gagasan pengembangan pendidikan sedangkan perempuan kurang terlihat. Begitu pula dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat, *native speaker*, dan MGMP Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia kendati pun dipimpin oleh perempuan namun kenyataannya dari aspek kemampuan dan peran serta aspirasi yang ditunjukkan oleh laki-laki masih lebih dominan dibandingkan perempuan. Kenyataan lainnya dalam evaluasi ketiga program madrasah di atas tampaknya lebih banyak dibuat oleh panitia pelaksana dalam bentuk laporan kegiatan saja dan kurang melibatkan *stakeholders* untuk menilai baik dari aspek perencanaannya maupun pelaksanaan program pendidikan di MAN IC Gorontalo.

### **Partisipasi Stakeholders**

Partisipasi sesungguhnya lahir dari desakan kebutuhan psikologis yang mendasar setiap individu. Keinginan untuk berpartisipasi didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan, ingin memperoleh pengakuan, dan hasrat untuk bergantung pada orang lain, tetapi juga sebaliknya sebagai tempat orang bergantung.<sup>6</sup>

Partisipasi adalah rangkaian penyampaian gagasan dan aktualisasi kontribusi, kemampuan, peran, dan aspirasi dari *stakeholders* yang dilakukan

---

<sup>5</sup>Marzani Anwar, *Modul Membangun Relasi Setara Antara Perempuan dan Laki-laki Melalui Pendidikan Islam*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, 2010), h. 48.

<sup>6</sup>Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik* (Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit), (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h.233

secara sadar dan tanpa paksaan, bertujuan untuk pengembangan program pendidikan ke arah yang lebih baik, dan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum, budaya, dan demokrasi.<sup>7</sup>

Istilah *stakeholders* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua kata, yaitu *stake* dan *holder*. *Stake* berarti *to give support to*/pancang, *holders* berarti pemegang. Jadi *stakeholders* adalah siapa pun yang memiliki kepentingan dari sebuah usaha. Secara umum kata *stake* dapat diartikan sebagai "kepentingan", sedangkan kata *holder* diartikan sebagai "pemegang". Jadi *stakeholders* berarti pemegang kepentingan. Implikasi dari pengertian *stakeholders*, adanya kelompok menjadi urgen dan perlu dalam upaya mengembangkan partisipasi. Setiap individu dan kelompok adalah pelaku, yang berhak menetapkan segala sesuatu berdasarkan pada tata nilai, tradisi, kemampuan, tujuan, dan bagaimana cara mencapai tujuan itu.

Penerapan kebijakan pemerintah seperti Manajemen Berbasis Madrasah mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari semua pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah yang dikenal dengan istilah *stakeholders*, baik warga sekolah/madrasah seperti guru, kepala madrasah, peserta didik, dan tenaga-tenaga kependidikan lainnya, maupun warga di luar madrasah seperti orang tua peserta didik, akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang mewakili masyarakat yang diwadahi melalui komite madrasah.<sup>8</sup>

Partisipasi *stakeholders* pendidikan berarti dedikasi/kontribusi, kemampuan, peran, dan aspirasi yang diberikan oleh orang atau badan yang berkepentingan menjadi pemegang sekaligus pemberi dukungan terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Townsley dalam Wakka mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi dua yaitu: (1) *Stakeholder* primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumber daya, baik sebagai mata pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi. (2) *Stakeholder* sekunder adalah pihak yang memiliki minat

---

<sup>7</sup>Sumarto Sj. Hetifah, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h.188.

<sup>8</sup>Kemendiknas, *Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2010), h. 67.

atau kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumber daya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pasal 56 bahwa *stakeholders*, yaitu: (a) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. (b) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. (c) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkatan satuan pendidikan.<sup>10</sup>

*Stakeholders* pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal. *Stakeholders* internal adalah orang atau badan yang berkepentingan menjadi pemegang sekaligus pemberi dukungan terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan yang terlibat secara langsung yang berada di dalam suatu sekolah. Adapun komponen-komponen yang termasuk dalam *stakeholders* internal adalah: kepala sekolah, guru, peserta didik, pegawai tata usaha, pengawas, dinas pendidikan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain.<sup>11</sup>

*Stakeholders* eksternal adalah orang atau badan yang berkepentingan menjadi pemegang sekaligus pemberi dukungan terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan secara tidak langsung yang berada di luar sekolah. Komponen-komponen yang termasuk ke dalam *stakeholders* eksternal adalah orang tua peserta didik, komite sekolah, dewan pendidikan, toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Kadir, A. W., Purwanto, R. H., & Poedjirahajoe, E. (2013). Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Propvinsi Sulawesi Selatan (Stakeholder Analysis of Bantimurung Bulusaraung National Park Management, South Sulawesi Province). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 20(1), 11-21.

<sup>10</sup>Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 345-346.

<sup>11</sup>Syaiful, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 346.

<sup>12</sup>Syaiful, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 347.

*Stakeholders* internal terlibat langsung dalam sistem pendidikan, sedangkan *stakeholders* eksternal termasuk ke dalam bagian di luar lingkaran sistem pendidikan tetapi berkaitan secara tidak langsung pada komponen pendidikan di dalamnya. *Stakeholders* eksternal pendidikan tidak mempunyai kapasitas yang lebih besar dari *stakeholders* internal dalam menghasilkan perubahan pendidikan.

### **Manajemen Berbasis Madrasah Responsif Gender**

Manajemen Berbasis Madrasah adalah suatu model pengelolaan madrasah yang memberikan kewenangan dan otonomi lebih luas kepada kepala madrasah bersama guru, orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan pembelajaran yang kreatif, aktif, menyenangkan dan memperoleh dukungan partisipasi *stakeholders* secara optimal. Manajemen Berbasis Madrasah diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah, memberikan fleksibilitas/keluwasan-keluwasan kepada madrasah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga madrasah dan masyarakat serta pemerintah meningkatkan mutu madrasah.<sup>13</sup>

Adapun gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan yaitu perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, dan jantan<sup>14</sup> Gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>15</sup>

Jadi, Manajemen Berbasis Madrasah responsif gender adalah manajemen yang memberikan otonomi madrasah, fleksibilitas, partisipasi, dan kesetaraan serta keadilan gender untuk meningkatkan mutu madrasah. Manajemen responsif gender juga dapat diartikan sebagai model manajemen yang menyediakan akses yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk berperan di dalamnya serta menghasilkan manfaat sama bagi keduanya.

---

<sup>13</sup> Depdiknas, *Manajemen Berbasis Madrasah (MBS)* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007), h.12.

<sup>14</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h.16.

<sup>15</sup> Mufidah Ch, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 5.

Adapun tujuan Manajemen Berbasis Madrasah responsif gender adalah mendorong terwujudnya prinsip laki-laki dan perempuan dalam menjalankan sistem manajemen di madrasah yang meliputi; fungsi pengambilan kebijakan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan kontrol pelaksanaan di semua tingkat.<sup>16</sup>

Manajemen Berbasis Madrasah responsif gender mendorong adanya otonomi, fleksibilitas, peningkatan partisipasi, responsif gender. Aplikasinya dengan menyediakan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berperan dan mendapatkan manfaat sama: menghargai adanya karakter kerja, kesempatan dan tugas kultural yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tugas kekinisan: perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kepentingan yang sama dalam menempati setiap posisi, kontrol, dan manfaat yang sama.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah fenomenologis yang berupaya memahami persepsi informan tentang suatu situasi tertentu, biasanya mengandalkan wawancara mendalam. Jenis penelitian yang adalah kualitatif deskriptif yang berupaya memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti.

Data primer penelitian meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara pengurus komite madrasah, kepala madrasah, orang tua, masyarakat, guru dan peserta didik serta dari hasil observasi. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui telaah terhadap referensi perpustakaan dan dokumen terkait maupun data profil madrasah, kurikulum, rencana anggaran pembiayaan madrasah dan dokumen madrasah yang terkait dan dianggap relevan dengan permasalahan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif memiliki 3 (tiga) komponen utama yang harus dipahami. Ketiga komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan maupun verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi baik sumber maupun metode.

---

<sup>16</sup>Marzani Anwar, *Modul Membangun Relasi Setara Antara Perempuan dan Laki-laki Melalui Pendidikan Islam*, h. 49.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Partisipasi *Stakeholders* dalam Manajemen Berbasis Madrasah Responsif Gender di MAN Insan Cendekia Gorontalo**

Partisipasi *stakeholders* dalam Manajemen Berbasis Madrasah responsif gender dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu partisipasi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan yang melibatkan orangtua peserta didik, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya berupa kontribusi, kemampuan, peran, dan aspirasi kepada pencapaian program pendidikan

Keterlibatan *stakeholders* dalam Manajemen Berbasis Madrasah responsif gender melalui perencanaan pendidikan dapat dilihat dari keaktifan pemateri maupun peserta yang berasal dari luar yang diundang untuk menghadiri rapat dan memberikan kontribusi pemikiran baik laki-laki maupun perempuan sehingga berjalannya pelaksanaan program pendidikan. Setiap awal tahun dilakukan rapat kerja untuk menentukan perencanaan pendidikan setahun ke depan.

Perencanaan program termasuk di asrama putri maupun putra menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan kegiatan di kelas. Konsekuensi pada tataran implementasi kurikulum adalah menghindari pembatasan waktu antara pembelajaran formal di kelas dan pembelajaran nonformal di asrama. Jadi, tidak ada lagi pemilahan antara pembelajaran asrama dan kelas bagi peserta didik maupun guru laki-laki dan perempuan. Esensinya pembelajaran yang telah diprogramkan dan didesain dalam kurikulum dilakukan di kelas, perpustakaan, laboratorium, masjid, dan asrama.

Hasil perencanaan program pendidikan tahun ini melalui rapat kerja tahun sebelumnya dituangkan program tahunan yang setelah dipilah terdapat tiga kegiatan yang penulis pandang terkait dengan *stakeholders* yaitu pengabdian masyarakat, *native speakers*, dan MGMP AGEI.

Tabel: 1  
Partisipasi *Stakeholders* dalam MBM Aspek Perencanaan Pendidikan Responsif Gender di MAN IC Gorontalo

No	Aspek Partisipasi	Bentuk Partisipasi
1	Kontribusi	Pemikiran/Ide yang disampaikan unsur komite madrasah, pengawas, kanwil agama, dan pakar saat rapat kerja



2	Kemampuan	Kehadiran unsur komite madrasah, pengawas, kanwil agama, dan pakar mengikuti rapat kerja
3	Peran	Pemateri dan Peserta Rapat Kerja dari unsur komite madrasah, pengawas, kanwil agama, dan pakar
4	Aspirasi	Pemberian tanggapan/materi dari unsur komite madrasah, pengawas, kanwil agama, dan pakar

Tidak banyak unsur *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan rapat kerja yang melibatkan unsur komite madrasah, pengawas, kanwil agama, dan pakar baik sebagai pemateri maupun peserta kegiatan. Akan tetapi dilihat dari jenis kelamin umumnya di dominasi oleh laki-laki dalam kontribusi yang diberikan untuk kegiatan perencanaan pendidikan dalam kegiatan rapat kerja ini.

Setelah ditentukan program yang dijadikan landasan dalam pembahasan sekaligus yang menjadi fokus penelitian ini kemudian ditelusuri aspek-aspek yang diterapkan dalam pelaksanaannya baik kontribusi, kemampuan, peran, dan aspirasi yang diberikan oleh *stakeholders* yang terlibat di dalamnya secara mandiri dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan.

Adapun kegiatan yang terkait dengan Manajemen Berbasis Madrasah yaitu: kegiatan pengabdian masyarakat bagi peserta didik, *native speakers*, dan MGMP ekonomi. Kegiatan tersebut telah direncanakan dalam rapat kerja tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun ini dengan melibatkan sumber daya manusia yang ada di madrasah maupun pihak lain yang terlibat baik sebagai pemateri, peserta, maupun panitia. Pelaksanaan kegiatan juga telah ditentukan alokasi waktunya dan alokasi dana yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta keterlibatan *stakeholders* di dalamnya yang terdiri atas laki-laki maupun perempuan sesuai yang relevan dengan jenis program yang dilakukan.

Partisipasi *stakeholders* dalam MBM responsif gender di MAN IC Gorontalo dibuktikan keterlibatan dari unsur orang tua peserta didik secara langsung tampaknya masih kurang dirasakan karena orang tuanya jauh sebab secara umum peserta didik yang menimba ilmu di madrasah ini berasal dari luar daerah ini. Akan tetapi yang sifatnya seperti gotong royong masyarakat sudah ikut mendukung melaksanakan program MAN IC Gorontalo seperti kegiatan pengabdian masyarakat bagi peserta didik, walaupun masih adanya masyarakat

yang kurang terlibat dalam pelaksanaannya dikarenakan karena penekannya pada masyarakat yang berada dekat lingkungan madrasah saja.

Tabel: 2  
Partisipasi *Stakeholders* dalam Pengabdian Masyarakat  
Bagi Peserta Didik di MAN IC Gorontalo

No	Aspek Partisipasi	Bentuk Partisipasi
1	Kontribusi	Tempat tinggal, tenaga, makanan, ide, pengalaman
2	Kemampuan	Selama tiga hari
3	Peran	Kepala Rumah Tangga
4	Aspirasi	Berbicara dan bekerjasama

Kegiatan pengabdian masyarakat bagi peserta didik terlihat kontribusi masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik dalam menyumbangkan tempat tinggal maupun bantuan makanan/minuman dalam program tersebut yang berguna dan bermanfaat bagi peserta didik. Ini dapat dilihat dari masyarakat di lingkungan madrasah yang cukup banyak menyumbangkan apa yang dimilikinya di rumah untuk digunakan oleh peserta didik yang tinggal di rumahnya karena sudah merasa bagian dari keluarga yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perlakuannya.

Selain kegiatan pengabdian masyarakat bagi peserta didik juga dilakukan partisipasi *stakeholders* dalam manajemen berbasis madrasah responsif gender melalui kegiatan *native speakers*. Kegiatan *native speakers* bahasa Arab dilakukan oleh satu orang tenaga pengajar yang didatangkan dari Universitas al-Azhar Mesir.

Tabel: 3  
Partisipasi *Stakeholders* dalam Kegiatan *Native Speaker*  
di MAN IC Gorontalo

No	Aspek Partisipasi	Bentuk Partisipasi
1	Kontribusi	Pemberian ilmu, keterampilan, nilai
2	Kemampuan	Sesuai Jadwal
3	Peran	Guru/Pengajar
4	Aspirasi	Bimbingan Bahasa di Kelas/Masyarakat

Partisipasi *stakeholders* dalam kegiatan pengabdian peserta didik adalah merupakan kegiatan yang rutin setiap tahun dilakukan dan tidak membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaannya. Hanya saja pada kenyataannya masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan masih sedikit diakibatkan waktu yang kurang untuk ikut serta dalam kegiatan peserta didik di rumah-rumah masyarakat karena faktor kesibukan pekerjaan, sedangkan kegiatan yang sifatnya partisipasi adalah berupa makanan atau minuman yang disiapkan selama berada di rumah warga karena selalu makan bersama tiga kali sehari yakni makan pagi, siang dan makan malam.

Kegiatan *native speakers* dengan mendatangkan guru dari luar negeri yakni Mesir dengan system yang diatur oleh pihak madrasah sehingga program ini tampaknya lebih diperankan oleh pembimbing laki-laki yang diminta atau diusulkan oleh pihak madrasah. Adapun aktivitas rutin pembimbing *native speaker* bahasa Arab yakni Syeikh Adel Abdelrehim Sayed Abdelegid, yang berasal dari al-Azhar Kairo, Mesir ini tidak saja membimbing bahasa Arab namun juga di luar sekolah terkadang diundang oleh masyarakat atau lembaga/institusi pendidikan dan organisasi sosial keagamaan di wilayah Provinsi Gorontalo untuk memberikan tausiyah agama.

Kegiatan lainnya yang melibatkan partisipasi *stakeholders* perspektif gender adalah MGMP Ekonomi yang terdiri atas 66 orang guru dari SMA/MA Negeri maupun Swasta yang berada di Provinsi Gorontalo yang diketuai oleh guru mata pelajaran Ekonomi di MAN IC Gorontalo. Kegiatan ini telah memberikan kontribusi, kemampuan, peran dan aspirasi baik dari guru laki-laki maupun perempuan melalui pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang diketuai oleh guru MAN IC Gorontalo dengan keterlibatan dari 66 guru lainnya sebagai anggota.

Partisipasi *Stakeholders* dalam hal ini adalah guru ekonomi di luar MAN IC Gorontalo sekaligus sebagai pakar di bidangnya sehingga berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen berbasis madrasah responsif gender karena melibatkan berbagai guru ekonomi dari seluruh madrasah yang ada di Gorontalo dengan program kerja yang diimplementasikan di madrasah masing-masing setelah melalui proses perencanaan di MGMP.

Setiap pertemuan pengurus dan anggota tampak memberikan kontribusi berupa waktu dan ide melalui kehadirannya dan pemaparan PTK dan *Best*

*Practice* yang telah diprogramkan sebelumnya. Partisipasi ini juga terlihat dari banyaknya aspirasi yang ditunjukkan oleh pengurus dan anggota MGMP Ekonomi melalui Kerjasama dengan AGEI dan didukung ketua MGMP yang merupakan guru ekonomi pada MAN IC Gorontalo. Kegiatan yang dilakukan secara rutin tersebut selain sudah direncanakan sebelumnya melalui rapat yang diadakan di awal tahun oleh MGMP juga disusun kepanitiaan dan jadwal kegiatan serta absen yang harus diisi oleh setiap peserta sebagai bukti keseriusan dan tanggungjawab yang tinggi untuk menjalankan program MGMP Ekonomi.

Tabel: 4  
Partisipasi *Stakeholders* dalam Kegiatan MGMP Ekonomi  
di MAN IC Gorontalo

No	Aspek Partisipasi	Bentuk Partisipasi
1	Kontribusi	Pemaparan PTK dan <i>Best Practice</i>
2	Kemampuan	Menyediakan Waktu dan Ide Tiap Pertemuan
3	Peran	Pengurus dan Anggota sebagai Guru Ekonomi
4	Aspirasi	Kerjasama dengan AGEI dan didukung ketua MGMP

MAN Insan Cendekia Gorontalo telah memfasilitasi kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang merupakan salah satu Kegiatan Kolektif Guru mata pelajaran ekonomi yang tergabung dalam Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) di Provinsi Gorontalo. Peserta yang mengikuti kegiatan ini meliputi guru mata pelajaran pada SMA/MA Negeri maupun Swasta, baik yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun guru tidak tetap atau honorarium, baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan pada aspek evaluasi program peneliti tidak menemukan dokumen yang terkait dengan hal ini sehingga hanya diperoleh data laporan kegiatan dari masing-masing penanggungjawab program dimaksud yang diberikan oleh bendahara di MAN IC Gorontalo. Evaluasi secara meluas dari *stakeholders* tidak ditemukan dalam dokumen melainkan hanya dalam bentuk pemberian pertimbangan berupa masukan atau kritikan dari orang tua peserta didik maupun kepala madrasah, pengawas, maupun inspektorat untuk memeriksa laporan kegiatannya dan dalam bentuk catatan pada saat rapat atau supervisi oleh kepala madrasah.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi *Stakeholders* dalam MBM Responsif Gender di MAN Insan Cendekia Gorontalo**

### *Faktor Pendukung*

Dalam tahap tertentu pendidikan di MAN IC Gorontalo telah memberi peluang bagi mereka yang tidak mampu dan berprestasi baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun dalam modal sosial berbeda, peserta didik miskin tetap akan berlaga dalam start yang tidak sama. Dalam persaingan yang sepenuhnya "fair" –akibat modal sosial yang berbeda– jika tidak ada kebijakan afirmatif terhadap kelompok peserta didik yang tidak beruntung (miskin), membuat mereka tetap tidak mendapatkan porsi yang memadai. Dengan dikembalikannya biaya pendidikan yang sepenuhnya ditanggung negara melalui sistem DIPA ternyata terdapat sejumlah *trade off*.

Sistem DIPA sangat ketat pertanggungjawabannya dan tidak fleksibel. Guru, terutama kepala madrasah menjadi banyak terbebani oleh persoalan administrasi. Kepala madrasah yang dalam fase pertama dan kedua sepenuhnya berkonsentrasi dalam pengelolaan pendidikan, kini 80 persen waktunya habis untuk mengurus manajemen keuangan. Dibanding dalam fase Pertama, meskipun pada waktu itu, seluruh sistem pendidikan juga ditanggung negara, tetapi dalam bidang administrasi seluruhnya ditanggung BPPT. Guru baik laki-laki maupun perempuan tinggal mengajar dan berkreaitivitas.<sup>17</sup>

Partisipasi orang tua peserta didik tampaknya menjadi sangat rendah. Mereka merasa seluruh kebutuhannya telah ditanggung negara. Akibatnya orang tua tinggal menunggu anaknya lulus, tanpa harus merasa perlu mendampingi seluruh proses pendidikan yang sedang berjalan. Oleh karena dalam biaya pendidikan tidak seluruhnya tercover dalam DIPA maka guru dan kepala madrasah menjadi kesulitan tanpa membebankan kepada orang tua peserta didik.

Selain faktor dana yang ditanggung pemerintah, faktor pendukung lainnya bahwa MAN Insan Cendekia Gorontalo sebagai madrasah yang menerapkan sistem *boarding school* tentu banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik. Peserta didik MAN Insan Cendekia ditanamkan sikap disiplin dan ditanamkan sikap sehingga peserta didik tampaknya setiap hari terlihat

---

<sup>17</sup>Jurnal PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h. 125 – 148.

mengatur waktu dengan segala kegiatan yang dilakukan di madrasah dan asrama sesuai dengan peraturan yang ada, baik itu peserta didik laki-laki maupun perempuan.

*Faktor penghambat*

MAN IC Gorontalo tahap sekarang yang sepenuhnya disubsidi dan seharusnya ditujukan hanya untuk peserta didik miskin, pada kenyataannya sebagian besar siswa justru berasal dari kelompok sosial menengah, sehingga subsidi sebagian besar tidak tepat sasaran, padahal kelas menengah secara etis mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi secara finansial (dan politik) dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada akhirnya, dunia usaha sebagai salah satu *stakeholder* dan pengguna akhir hasil pendidikan, tampak belum dilibatkan dalam pengembangan MAN IC Gorontalo, baik untuk aspek pengembangan, misalnya pendanaan melalui CSR, penyediaan sarana pembelajaran (misalnya untuk widya-wisata industri), maupun pendidikan kewirausahaan. Padahal, di pihak lain, dunia usaha di negara lain tempat sebagian lulusan MAN IC Gorontalo melanjutkan, cenderung terlibat dengan penyelenggaraan pendidikan dan pemanfaatan lulusan MAN IC Gorontalo.

Faktor penghambat kedua, di luar isu gaji yang lebih kecil dibandingkan masa sebelumnya (pada Fase Pertama dulu gaji guru empat kali guru PNS), manajemen tenaga pendidikan secara sentralistik (di tangan Kemenag) cenderung mendorong pertanggungjawaban guru lebih berorientasi formal-administratif "ke atas" dan kurang berorientasi pada peningkatan kinerja peserta didik dan pertanggungjawaban kolegial sebagai korps MAN IC Gorontalo sebagai korps madrasah model. Akibatnya, modal kreativitas manajemen dan model pembelajaran yang selama ini telah diakumulasi MAN IC Gorontalo selama masa otonomi periode yakni setelah berubah menjadi MAN IC Gorontalo yang sebelumnya di bawah naungan kemendikbud sehingga cenderung kurang berkembang sekarang.

Saat ini manajemen yang dikembangkan terpusat karena berada di bawah naungan kemenag yang belum menerapkan sistem desentralisasi namun masih bersifat sentralistik sehingga terkadang menyulitkan dalam peningkatan partisipasi *stakeholder* berbasis gender dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah.

Lemahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha pada penyelenggaraan MAN IC Gorontalo sebagiannya merupakan akibat dari dicabutnya Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 2001 yang lebih demokratis dengan diterbitkannya KMA Nomor 409 Oktober 2003 yang lebih birokratis dan kurang demokratis. KMA 101/2001 pada dasarnya merupakan upaya reformasi internal organisasi madrasah dan eksternal yaitu hubungan antara staf madrasah dengan kantor Kanwil, melalui tujuh kewenangan yang diberikan kepada komite madrasah sebagai representasi masyarakat. Tujuh kewenangan komite madrasah itu adalah kewenangan memilih kepala madrasah, anggaran, kurikulum muatan lokal, rencana pembelajaran, rekrutmen guru, pengawasan dan evaluasi pembelajaran.

Dengan "kegagalan" itu maka ditetapkan KMA 409/2003 yang justru kembali memperkuat posisi Kanwil dan kepala madrasah, yang berdampak pada hilangnya ruang demokrasi dan transparansi publik. Dalam hal ini, civitas MAN IC Gorontalo menganggap bahwa pencabutan KMA 101/2001 itu juga merugikan, karena sistem *governance* yang diderivasi dari KMA 101 ini dianggap telah terbukti mendorong tanggungjawab semua *stakeholders* dan telah berhasil mendorong manajemen sehingga dapat memberikan layanan yang cepat dan prima sehingga hasil pembelajaran lebih optimal.

Partisipasi masyarakat/orangtua pada penyelenggaraan pendidikan berdampak positif pada hasil pembelajaran banyak berkesejajaran dengan berbagai hasil penelitian. Sebaliknya KMA 409/2003 dianggap telah mengurangi partisipasi masyarakat, mengurangi ruang gerak madrasah, menjebakannya pada manajemen yang formalistis dan berorientasi ke prosedur yang ditentukan dari atas, bukan berorientasi pada pengembangan madrasah yang tanggap dan inovatif untuk perbaikan hasil pembelajaran. Kepmen yang baru itu juga melemahkan rasa memiliki di kalangan pegawai akibat sistem rekrutmen kepegawaian dan manajemen keuangan di MAN IC Gorontalo yang kurang otonom akibat sentralisasi.

### **Kesimpulan**

Partisipasi *stakeholders* dalam Manajemen Berbasis Madrasah responsif gender di MAN Insan Cendekia Gorontalo berupa partisipasi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan yang melibatkan orangtua peserta didik, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya berupa

kontribusi, kemampuan, peran, dan aspirasi kepada pencapaian program pendidikan secara otonom atau mandiri yang pelaksanaannya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan yaitu ditekankan pada kegiatan pengabdian masyarakat bagi peserta didik, *native spekaer*, dan kegiatan MGMP ekonomi di MAN IC Gorontalo.

Faktor pendukung partisipasi *stakeholders* dalam Manajemen Berbasis Madrasah responsif gender di MAN Insan Cendekia Gorontalo terdiri atas *pertama*, pembiayaan ditanggung negara melalui DIPA sehingga yang dibiayai oleh orang tua tidak dibebankan lagi biaya investasi dan biaya akademik, sedangkan biaya personal berupa makan, baju, dan sejenisnya ditanggung oleh orang tua kaya dan orang tua miskin diberikan beasiswa kepada anaknya. *Kedua*, padatnya kegiatan peserta didik dengan sistem *boarding school* sehingga tertanam disiplin dan tanggungjawab peserta didik perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan setiap kegiatan. Adapun faktor penghambatnya adalah *pertama*, ketergantungan dana yang sangat besar kepada pemerintah sehingga kurangnya diberi ruang partisipasi masyarakat dan juga dunia usaha, kurang terpacu untuk bersinergi dengan madrasah dan faktor lainnya adalah manajemen tenaga pendidikan secara sentralistik sehingga cenderung mendorong pertanggungjawaban guru lebih berorientasi formal-administratif "ke atas" dan kurang berorientasi pada peningkatan kinerja peserta didik dan pertanggungjawaban kolegal sebagai korps MAN IC Gorontalo sebagai korps madrasah model. *Kedua*, manajemen tenaga pendidikan secara sentralistik.

### **Daftar Pustaka**

- Anwar, Marzani, *Modul Membangun Relasi Setara Antara Perempuan dan Laki-laki Melalui Pendidikan Islam*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, 2010.
- Arif, Armai, *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD Press, 2005
- Asrohah, Hanun, *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Kopertais Press, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2001
- Depdiknas, *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007



- Kemendiknas, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2010
- Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Madrasah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasdian, *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Putri Deby Febiolla, "Analisa Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Madiun", *Jurnal Fisip Universitas Airlangga Surabaya*, 2017.
- Sagala, Syaiful, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung Alfabeta, 2009
- Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik (Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006
- Syahu, Sugian, *Kamus Manajemen (Mutu)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syaiful, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Umaedi, dkk., *Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Kadir, A. W., Purwanto, R. H., & Poedjirahajoe, E. (2013). Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Propvinsi Sulawesi Selatan (Stakeholder Analysis of Bantimurung Bulusaraung National Park Management, South Sulawesi Province). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 20(1)